

sumber pendanaannya.

Realitas politik menunjukkan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusung-nya. Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sistem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra struktur politik adalah dari sektor masyarakat. Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi:

- a. Partai politik.
- b. Caleg dari partai politik yang bersangkutan.
- c. Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum.

Berdasarkan gambaran fakta di lapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b),

tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif "usaha", dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk "pengembalian modal" mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam "perlindungan atau kepentingan politik tertentu". Donasi yang diberikan mengikat si politisi, "harus mengikuti kepentingan" dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal, yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan out-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menunjukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter

SIKLUS BISNIS POLITIK



Acuviarta Kartabi, S.E., M.E.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung

Pendahuluan

Saat ini sedang berlangsung proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Tahapan demi tahapan sedang dilalui sampai akhirnya nanti terpilih Kepala Daerah yang sah dan *legitimet*. Selain proses politik dan administratif yang terus berlangsung, Pilkada sesungguhnya juga mengandung makna ekonomi strategis. Makna substansi ekonomi ini yang seringkali terlewat. Dimana letak makna substansi ekonomi yang penting untuk kita cermati?. **Pertama**, Pilkada Jabar menghabiskan biaya yang tidak sedikit, selain semua juga tahu kenapa diselenggarakan serentak? Salah satunya pertimbangan efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menganggarkan tidak kurang dari Rp.1,6 Triliun untuk pelaksanaan Pilkada Jabar.

Angka itu belum termasuk anggaran Pilkada yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota yang juga menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Masing-masing Pasangan Calon (Paslon) juga tidak ketinggalan menganggarkan dana untuk mendukung kemenangannya. Jadi berapa banyak nilai Rupiah dana yang digelontorkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Jabar 2018? Yang pasti jawabannya sangat besar.

Kedua, substansi ekonomi Pilkada juga menyangkut materi kampanye masing-masing Paslon. Penulis sering menyebut simplikasinya dengan penggalan kalimat "**Pesta Politik, Menu Ekonomi**". Kenapa? Sebab topik yang menarik dari setiap Pilkada adalah persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Masing-masing Paslon akan mengidentifikasi isu-isu, topik-topik hingga masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi saat

ini. Apalagi kondisi ekonomi Jabar maupun kondisi ekonomi di Kabupaten/Kota dalam beberapa tahun terakhir tidak semuanya menggembarakan. Sebut saja diantaranya tentang daya beli rumah tangga. Tren penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi sejak triwulan II dan triwulan III tahun 2017, baik secara *year on year* maupun *quarter to quarter*. Perhatian mendorong konsumsi rumah tangga sangat penting, mengingat kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Jabar mencapai rata-rata 64 persen. Faktor utama yang memperlambat LPE tahun 2017 adalah perlambatan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), tahun 2016 PKRT masih mampu berkontribusi terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 3,52 persen, namun tahun 2017 kontribusi PKRT terhadap sumber pertumbuhan PDRB Jabar hanya mencapai 2,91 persen. Belum lagi jika melihat perlambatan laju pertumbuhan ekonomi 2017. Tahun 2017 LPE Jabar hanya mampu mencapai 5,29 persen, lebih rendah dibandingkan LPE tahun 2016 (5,66 persen). Beragam persoalan ekonomi masih mengganjal perekonomian Jabar, tingkat inflasi 2017 naik ke 3,63 persen, padahal 2016 sempat hanya 2,75 persen. Kemudian, meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jabar tahun 2017 turun, dari 8,49 persen per Februari 2017 ke 8,22 persen per Agustus 2017, namun TPT berdasarkan kelompok

pendidikan yang ditamatkan diluar SD semuanya naik. Jadi hanya TPT penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD yang turun, diluar itu tingkat pengangguran terbukanya naik. Tingkat pengangguran tamatan SMK per Agustus 2017 bahkan mencapai 16,8 persen. Angka TPT lulusan perguruan tinggi juga naik, dari 4,90 persen per Februari 2017 ke 5,50 persen per Agustus 2017.

Para paslon juga wajib tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir, perusahaan non pertanian di Jabar sudah meningkat 9,96 persen. Tahun 2006 jumlah perusahaan non pertanian masih sebanyak 4,21 juta usaha/perusahaan. Sensus ekonomi terakhir yang dilakukan setiap 10 tahun sekali (2016) menunjukkan jumlah perusahaan di Jabar sudah mencapai 4,63 juta usaha/perusahaan. Masalahnya 98,49 persen jumlah perusahaan (4,56 juta perusahaan) di Jabar masih skala usaha mikro kecil (UMK), baru 0,07 juta perusahaan yang masuk katagori skala usaha menengah besar (UMB). Jadi selain mengejar pertumbuhan wirausaha baru, juga dibutuhkan peningkatan skala usaha perusahaan di Jabar. Mengembangkan perusahaan ke bisnis yang lebih variatif juga dibutuhkan, sebab 47,28 persen (2,19 juta perusahaan) terkonsentrasi di bisnis perdagangan (besar dan eceran). Jadi selain mengejar kuantitas jumlah perusahaan, peningkatan skala usaha dan pengembangan variasi lapangan usaha juga penting untuk diperhatikan. Banyak lagi persoalan ekonomi

yang masih mengganjal, sebut saja persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar petani (TPT) dan sebagainya.

Ketiga, penting untuk mencermati visi, misi, strategi dan program ekonomi yang ditawarkan oleh masing-masing Paslon. Setelah masing-masing paslon mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ekonomi, kalangan kampus khususnya juga perlu memperhatikan kadar relevansinya. Apakah janji-janji kampanye sudah merefleksikan kondisi ekonomi yang ada hari ini dan ke depan?. Kalangan *civitas academica* (selanjutnya disebut kalangan kampus) harusnya melihat pentingnya untuk mengetahui visi, misi, strategi, kebijakan serta program dari masing-masing pasangan Cagub/Cawagub Jabar yang berhubungan langsung dengan eksistensi serta pengembangan ekonomi Jabar. Selain itu kalangan kampus juga harusnya merasa penting untuk mengetahui tingkatan kadar pemahaman serta pengetahuan setiap pasangan Cagub/Cawagub akan beragam kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan eksistensi dan pengembangan ekonomi di Jabar. Terakhir kalangan kampus juga merasa penting untuk memberikan masukan kepada masing-masing pasangan Cagub/Cawagub berkaitan dengan harapan dan keinginan *civitas academica* terhadap Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya.

Teori vs Realitas

Sebagai bagian dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) perekonomian Jabar, sudah sewajarnya kalangan kampus secara institusi terlibat secara objektif dan netral dalam kegiatan politik sehat dalam bentuk edukasi publik terkait Pilkada. Tanpa komitmen itu, idealisme dan harapan perbaikan ekonomi akan sulit terwujud. Pada satu sisi proses awal keterlibatan *civitas academica* dapat dilakukan dalam kerangka tujuan mengenal lebih dalam masing-masing Cagub/Cawagub dan disisi lain sebagai bagian dari sarana/kegiatan/media bagi para Cagub dan Cawagub untuk mengenalkan diri kepada para *civitas academica* (termasuk entitas diluar kampus) guna menarik dukungan kalangan kampus dalam pencoblosan Pilkada nanti. Untuk itu penting untuk digaris bawahi bahwa peran kalangan kampus dalam perekonomian Jabar sangat besar dalam kontek Pilkada serta ikut menentukan dalam memajukan dan memantapkan eksistensi perekonomian Jabar ke depan. Atas dasar itu, **Gregory Mankiw (2007)**, Profesor Ilmu Ekonomi *Harvard University* jebolan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dan *Princeton University* dalam buku *Macroeconomics* mengatakan bahwa "karena kondisi perekonomian mempengaruhi setiap orang, maka isu-isu makro ekonomi memainkan peranan penting dalam perdebatan politis. Para pemilih sangat memperhatikan kinerja perekonomian, dan mereka tahu bahwa kebijakan pemerintah akan

sangat mempengaruhi perekonomian. Sebagai akibatnya (nantinya), popularitas presiden (baca: pemimpin daerah) terpilih meningkat ketika perekonomian berjalan baik dan jatuh bila terjadi sebaliknya" (Mankiw, 2007:2). Tentu dengan anggaran Pilkada yang besar dan sederet permasalahan ekonomi yang masih tersisa, harapan semua kalangan agar Pilkada Jabar 2018 bisa menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan beragam permasalahan ekonomi daerah. Salah memilih, bisa akibat terlalu emosional dan kurang rasional, dapat menambah permasalahan ekonomi ke depan. Itu konteks Pilkada dalam perspektif ekonomi politik, yakni bagaimana memilih kepala daerah sebagai sarana atau instrumen politik untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Jadi maknanya sangat jelas, bukan untuk kepentingan tujuan ekonomi segelintir kalangan, apalagi segelintir orang.

Siklus Bisnis Politik

Hubungan perspektif ekonomi politik terkait pemilu diantaranya dikemukakan oleh **Willian Nordhaus (1975)**, Profesor Ilmu Ekonomi dari *Yale University*. Dalam bukunya berjudul *The Political Business Cycle (1975: 169-190)*, Nordhaus mengatakan perlunya melihat (memperhatikan) siklus bisnis politik (*political business cycle*) pada masa-masa pemilu yang diartikan sebagai adanya kemungkinan potensi "manipulasi ekonomi untuk kepentingan pemilu". Kalangan aka-

demisi ekonomi seharusnya tidak dengan mudah percaya begitu saja dengan kehendak para politisi pembuat kebijakan. Apalagi lagi para politisi tersebut diduga tidak kompeten atau dalam istilah Nordhaus disebut sebagai adanya kemungkinan munculnya perilaku oportunistis. Makna manipulasi ekonomi untuk kepentingan pemilu dalam konteks kekinian dapat diartikan lebih luas karena adakalanya diwujudkan dalam bentuk janji-janji kampanye yang hanya melihat atau mengedepankan aspek populis untuk tujuan menarik dukungan masyarakat. Janji-janji tersebut dalam prakteknya berpotensi memanipulasi atau menyamarkan kondisi realitas ekonomi yang sesungguhnya demi untuk tujuan sesaat. Contoh janji memberikan dukungan finansial tertentu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur misalnya adalah bentuk-bentuk praktek semacam itu yang sering terjadi. Tidak ada yang salah dalam janji sepanjang didukung oleh data dan fakta serta siap dipertanggungjawabkan nantinya. Sebab maksimal 6 (enam) bulan setelah dilantik, Gubernur/Wakil Gubernur harus menuliskan janji-janjinya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 5 (lima) tahunan masa pemerintahannya. Masalahnya jika yang terjadi sebaliknya? Dalam kondisi semacam itu di awal peran akademisi kampus sangat diharapkan menjadi penyeimbang informasi yang disampaikan paslon pada masa-masa kampanye. Keterlibatan kалан-

gan kampus dan masyarakat dapat digalang dan dimobilisasi untuk mengkritisi serta menyampaikan informasi dan data yang lebih akurat serta relevan. Disitulah peran *civitas academica* sebagai wujud aplikasi berpolitik sehat yang sesungguhnya, bukan malah terlibat serta larut dalam sikap *"maju tak gental membela yang bayar"*. Kemudian dalam bukunya *Mankiw (2007: 406)* dengan lugas juga menyatakan bahwa inkompetensi dalam kebijakan ekonomi juga bisa muncul karena beberapa alasan. Sebagian ekonom memandang proses politik berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena proses politik mencerminkan pergeseran kekuasaan dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan khusus. Inkompetensi yang mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan ini bisa diibaratkan "tukang obat" menawarkan solusi yang menarik tapi ngawur terhadap masalah-masalah ekonomi yang kompleks.

Untuk itu pendekatan alternatif yang mendukung perilaku berpolitik sehat dapat diwujudkan dengan menggunakan atau meminjam asumsi ekonomi teori ekspektasi rasional (*rational expectations*) yang mengantarkan ekonom *Robert Lucas* dari *Chicago University* meraih hadiah Nobel tahun 1995 karena mengembangkan dan mengaplikasikan hipotesis ekspektasi rasional. Teori ekspektasi rasional mengasumsikan bahwa orang-orang secara optimal menggunakan seluruh informasi yang ada, termasuk informasi ten-

tang kebijakan ekonomi pemerintahan sekarang untuk meramalkan masa depan. Jika menggunakan prinsip-prinsip dasar pemikiran teori ekspektasi rasional, perubahan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh para politisi (baca: paslon) dalam wujud janji-janji kampanye pada akhirnya akan membentuk ekspektasi masyarakat. Salah satu dasar pemikiran teori ekspektasi rasional menganggap semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional mengetahui seluk beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Jadi jika meminjam asumsi dasar teori ekspektasi rasional dalam implementasi prinsip berpolitik sehat menurut penulis diantaranya dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi, melihat rekam jejak, melihat proses rekrutmen, melihat janji-janji kampanye dan kemudian mengkritisinya secara konstruktif. Untuk itu penting bagi kalangan kampus untuk menyampaikan masukan atau pendapat berkaitan peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi kepada masing-masing paslon. Jika langkah tersebut dapat ditempuh oleh kalangan *civitas academica*, maka sinkronisasi antara janji-janji politisi dengan realitas keadaan yang sesungguhnya akan lebih mendekati kenyataan. Kalangan kampus memaknai Pilkada lebih banyak kepada pertarungan gagasan, ide dan cita-cita membangun perekonomian Jawa Barat yang maju dan berkembang.

Kalangan *civitas academica* jelas pada akhirnya berkepentingan dengan Pilkada. Paling tidak secara rasional untuk melihat relevansi Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur ke masyarakat Jabar. Posisi Kampus sebagai lembaga yang membangun kompetensi pendidikan dan pengajaran, dianggap cukup paham letak persinggungan antara apa yang ditawarkan melalui janji-janji kampanye yang disampaikan oleh masing-masing Paslon dengan realitas peluang dan tantangan membangun perekonomian Jabar. Terlebih lagi sinergi sehat Paslon dengan kalangan kampus pada tahapan Pilkada bermakna mencari masukan-masukan dari kalangan pelaku bisnis (versi Paslon). Kepentingan kalangan kampus lainnya terhadap Pilkada adalah kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukan kepada masing-masing Paslon berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Jabar saat ini dan ke depan. Ajang Pilkada juga dapat digunakan sebagai kesempatan bagi kalangan kampus untuk melihat kadar (relatif) kemampuan masing-masing Paslon dalam memahami dinamika permasalahan dan potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi di Jabar, selain untuk menegaskan dan mendokumentasikan komitmen serta janji-janji para Paslon yang berkaitan dengan pengembangan pengembangan ekonomi daerah, jika asumsinya nanti terpilih sebagai

Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat pemenang Pilkada.

Kesimpulan

Kemesraan dinamika politik terkait Pilkada dengan dinamika hiruk pikuk keterlibatan individu-individu kalangan kampus didalamnya mungkin akan sangat intim menjelang Pilkada Serentak 2018. Untuk itu ada baiknya jika kita melihat pandangan-pandangan bijak yang harus dikedepankan dalam kerangka praktek politik yang sehat dan beretika. Pandangan *Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan* (salah satunya) dalam suatu kesempatan menurut penulis sudah sangat tepat dan bisa dijadikan dasar referensi kalangan kampus untuk berpolitik sehat. Merujuk pada ungkapan *Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan H.M Didi Turmudzi* yang dikutip penulis terkait Pilkada menyatakan bahwa "*Secara organisasi, bagaimanapun juga kami adalah organisasi yang independen. Bukan bagian dari partai politik manapun. Tapi kami punya sikap politik, sikap politik kami terkait pilkada Jabar adalah netral. Tetapi masing-masing pengurus, anggota dan lainnya punya hak dan saya sarankan untuk punya pilihan yang tepat sesuai dgn kebutuhan rakyat Jabar,*" (H.M. Didi Turmudzi, 2018): Jadi untuk itu penulis menafsirkan ungkapan tersebut sebagai tindakan apapun yang berhubungan dengan aksi institusi (lembaga) sudah jelas netral, sedangkan aksi dari masing-masing individu (orang per orang) dipersilahkan sesuai dengan hak poli-

itik masing-masing individu, tanpa membawa-bawa nama institusi (lembaga).

Meski suasana riang gembira musim Pilkada hanya sesaat, namun wajib disambut suka cita dalam konteks demokrasi politik. Keterlibatan kalangan kampus yang netral dan sehat dalam pesta demokrasi diyakini akan meningkatkan kadar kualitas pelaksanaan Pilkada serta sekaligus menghasilkan pemenang Pilkada terbaik pada masanya. Jadi pandai-pandai dan cerdas menempatkan posisi individu dan lembaga dalam momen Pilkada perlu ditegaskan serta dikongkritkan. *Stop* basa-basi, sekarang bukan zamannya. Ungkapan klasik *"tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi"*, sehingga perlu diartikulasikan secara kongkrit dan bertanggung-jawab dimana posisi kepentingan kalangan kampus dalam momen Pilkada?. Dalam perspektif ekonomi politik, kepentingan memajukan perekonomian Jabar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utamanya, jadi makna Pilkada adalah proses awal menuju cita-cita

itu. Terakhir, mari kita bersama-sama mencari kepala daerah yang bisa mewujudkan itu. Sambut rangkaian Pilkada dengan suka cita, perkuat silaturahmi dan barisan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, jangan malah sebaliknya. Menjaga kredibilitas kampus yang disegani harus terus dilanjutkan, jangan sampai karena *"nila setitik rusak susu sebelanga"*.

DAFTAR PUSTAKA

- Acuviarta, 2018. *Pesta Politik, Menu Ekonomi*, Pikiran Rakyat
- H.M Didi Turmudzi, *Jadi Cagub Jabar, TB Hasanudin Minta Restu Paguyuban Pasundan*. Detik.com, 2018
- N. Gregory Mankiw. 2007. *Macroeconomics*. Worth Publishers, AS
- Robert Lucas. 1976. *Econometric Policy Evaluation: A Critique*. Cornegie Rochester Conference on Public Policy, Amsterdam
- Willam Nordhaus. 1978. *The Political Business Cycle*. Review of Economic Studies, AS

Tidak halal bagi tiga orang yang berjalan di tengah padang kecuali jika ada seorang dari mereka yang menjadi pemimpin (HR. Ahmad)